

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. KULON PROGO
(076.01.657605)**

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 30 JUNI 2024



Jl. KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo
Telp. 0274-774433, 774342 Fax. 0274-774433

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Sekretaris,
Selaku Kepala Pengguna Anggaran



Widi Purnama, S.P., M.Si
NIP. 197309201992031001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KULON PROGO

Jalan Wahid Hasyim Bendungan Wates
Telp. 0274-774433, 774342 Fax. 0274-774342

Email : kulonprogo@kpud-diyprov.go.id Website : kpu-kulonprogokab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Widi Purnama, S.IP, M.Si
NIP 19730920 199203 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional (LO).....	5
Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
A.3. Basis Akuntansi.....	9
A.4. Dasar Pengukuran....	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1. Pendapatan.....	18
B.2. Belanja	19
B.3. Belanja Pegawai	20
B.4. Belanja Barang	21
B.5. Belanja Modal.....	21
B.5.1 Belanja Modal Tanah	22
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23
B.5.5 Belanja Modal Jalan Modal Lainnya	23
B.6. Belanja Bantuan Sosial	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	25
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	25
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	25
C.4. Piutang PNBK	26
C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	26
C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	27
C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar	27
C.8. Beban Dibayar Dimuka	28
C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	28
C.10. Persediaan	29

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	29
C.12 Tagihan Penjualan Angsuran	30
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	30
C.14 Tanah.....	31
C.15 Peralatan dan Mesin	31
C.16 Gedung dan Bangunan.....	32
C.17Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32
C.18 Aset Tetap Lainnya.....	33
C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	33
C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	33
C.21 Aset Tak Berwujud	34
C.22 Aset Lain-Lain	34
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	35
C.24 Uang Muka dari KPPN	35
C.25 Utang kepada Pihak Ketiga	36
C.26 Pendapatan Diterima di Muka	36
C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar	36
C.28 Ekuitas	37
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	38
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	38
D.2 Beban Pegawai	38
D.3 Beban Persediaan	38
D.4 Beban Barang dan Jasa	39
D.5 Beban Pemeliharaan	40
D.6 Beban Perjalanan Dinas	40
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	41
D.8 Beban Bantuan Sosial	41
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	42
D.11 Kegiatan Non Operasional	42
D.12 Defisit Pos Luar Biasa	44
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
E.1 Ekuitas Awal	45
E.2 Surplus (Defisit) LO	45
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset	45
E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan.....	45
E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	45
E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	46
E.3.5 Koreksi Lain-lain.....	46
E.4 Transaksi Antar Entitas.....	46

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain	47
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	47
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	48
E.5 Ekuitas Akhir..	48
F. Pengungkapan Lainnya	49
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	49
F.2 Pengungkapan Lain-Lain	49
Lampiran	50
Lampiran A.1	50

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	3
Tabel 2. : Ringkasan Neraca untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	4
Tabel 3. : Ringkasan Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	5
Tabel 4. : Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	6
Tabel 5. : Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	12
Tabel 6. : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	15
Tabel 7. : Revisi Anggaran.....	18
Tabel 8. : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	18
Tabel 9. : Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	19
Tabel 10. : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	19
Tabel 11. : Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	20
Tabel 12. : Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	21
Tabel 13. : Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024.....	21
Tabel 14. : Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024.....	22
Tabel 15. : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	22
Tabel 16. : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	22
Tabel 17. : Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	23
Tabel 18. : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Irigasi 30 Juni 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	23
Tabel 19. : Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	24
Tabel 20. : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	25
Tabel 21. : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	25
Tabel 22. : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas.....	26
Tabel 23. : Rincian Piutang PNBK.....	26
Tabel 24. : Rincian Bagian Lancar TP/TGR.....	26
Tabel 25. : Rincian Bagian Lancar TPA.....	27
Tabel 26. : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Lancar.....	27
Tabel 27. : Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	28
Tabel 28. : Tabel Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	28
Tabel 29. : Perbandingan Rincian Persediaan 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	29

Tabel 30.	: Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023.....	29
Tabel 31.	: Perbandingan Rincian Tagihan TPA.....	30
Tabel 32.	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang.....	30
Tabel 33.	: Rincian Mutasi Nilai Tanah.....	31
Tabel 34.	: Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin.....	32
Tabel 35.	: Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan.....	32
Tabel 36.	: Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	33
Tabel 37.	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	34
Tabel 38.	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud.....	34
Tabel39.	: Rincian Aset Tak berwujud.....	34
Tabel 40.	: Rincian Mutasi Nilai Aset Lain-lain.....	35
Tabel 41.	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	35
Tabel 42.	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga.....	36
Tabel 43.	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka.....	36
Tabel 44.	: Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	37
Tabel 45.	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	38
Tabel 46.	: Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	38
Tabel 47.	: Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	39
Tabel 48.	: Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	39
Tabel49.	: Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	40
Tabel 50.	: Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	40
Tabel 51.	: Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	41
Tabel 52.	: Rincian Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	41
Tabel 53.	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	42
Tabel 54.	: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024.....	42
Tabel 55.	: Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	43
Tabel 56.	: Rincian Pos Luar Biasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	44
Tabel 57.	: Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	45
Tabel 58.	: Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 30 Juni 2024.....	46
Tabel59.	: Rincian Koreksi Lain-Lain.....	46
Tabel 60.	: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.....	47
Tabel 61.	: Rincian Transfer Masuk.....	47
Tabel 62.	: Rincian Transfer Keluar.....	47
Tabel 63.	: Rincian Pengesahan Hibah.....	48
Tabel 64.	: Rekening yang Dikelola KPU Kabupaten Kulon Progo.....	49
Tabel 65	: Lampiran A1	50

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kulon Progo Semester I Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 0**, atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp 0**.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar **Rp 28.164.308.543,00** atau mencapai **44.00** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp 64.524.14.000,00**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode yang berakhir 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 31.689.627.927,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 31.003.050.473,00**; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp 685.377,454,00**; Piutang Jangka Pendek (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar **Rp 19.660.600.556,00**. dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp 1.200.000,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar sebagai berikut **Rp 12.029.027.371,00** dan **Rp 31.689.627.927,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar **Rp 0**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp. 31.633.954.615,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp (31.63.954.615,00)**. Kegiatan Non Operasional dan

Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar **Rp0** dan surplus sebesar **Rp(31.538.332.615,00)** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp (31.538.332.615,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Januari 2024 adalah sebesar **Rp 14.329.032.41,00** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp (31.538.332.615,00)** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp (0)** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp29.238.327.845,00** sehingga Ekuitas entitas pada periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah senilai **Rp12.029.02.371,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KULON PROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24		% thd Anng	30-Jun-23
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	0,00	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.457.628.000	1.445.622.230	58,82	1.273.009.414
Belanja Barang	B.4	62.066.786.000	26.718.686.313	43,05	10.294.052.666
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Hibah	B.6			0,00	
JUMLAH BELANJA		64.524.414.000	28.164.308.543	43,65	11.567.062.080

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NERACA

PER 30 Juni 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	31-Dec-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	30.968.182.233	12.960.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	4.868.240	686.845.460
Persediaan yang belum diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		31.003.050.473	13.646.845.460
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	-	-
Peralatan dan Mesin	C.16	2.567.440.136	2.471.818.136
Gedung dan Bangunan	C.17	284.648.000	284.648.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	153.818.130	153.818.130
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(2.320.528.812)	(2.229.297.585)
Jumlah Aset Tetap		685.377.454	680.986.681
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	198.461.500	198.461.500
Aset Lain-Lain	C.23	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(197.261.500)	(197.261.500)
Jumlah Aset Lainnya		1.200.000	1.200.000
JUMLAH ASET		31.689.627.927	14.329.032.141
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	30.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	193.713.218	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	14.963.900	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	582.438	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.29	19.421.341.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19.660.600.556	-
JUMLAH KEWAJIBAN		19.660.600.556	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.30	-	-
Ekuitas Dana Investasi	C.31	-	-
Ekuitas	C.32	12.029.027.371	14.329.032.141
JUMLAH EKUITAS DANA		12.029.027.371	14.329.032.141
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		31.689.627.927	14.329.032.141

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KULON PROGO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(dalam Rp)

URAIAN	CATA TAN	30-Jun-24	30-Jun-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.639.335.448	1.451.761.179
Beban Persediaan	D.3	2.135.010.948	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	24.803.859.504	9.258.296.592
Beban Pemeliharaan	D.5	56.226.300	59.793.100
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.908.291.188	996.354.574
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	91.231.227	71.410.124
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		31.633.954.615	11.837.615.569
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(31.633.954.615)	(11.837.615.569)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		95.622.000	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		95.622.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(31.538.332.615)	(11.837.615.569)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(31.538.332.615)	(11.837.615.569)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER TANGGAL 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
EKUITAS AWAL	E.1	14.329.032.141	613.431.848
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(31.538.332.615)	(11.837.615.563)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.5	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.6	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.7	-	-
KOREKSI HIBAH MASUK/KELUAR	E.8	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		29.238.327.845	11.567.062.074
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.300.004.770)	(270.553.489)
EKUITAS AKHIR	E.9	12.029.027.371	342.878.359

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. *Entitas dan Rencana Strategis* Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010. Entitas berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim Bendungan Wates.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas dan fungsi membantu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Melalui peran tersebut diharapkan mampu menciptakan demokrasi di

Indonesia yang berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”***Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I per 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I per 30 Juni 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga

disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek

revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali***(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progotelah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 4 kali revisi DIPA. Penyesuaian halaman III DIPA yaitu penyesuaian Realisasi dengan rencana Penarikan, dan Pengurangan Pagu Belanja dari KPU RI sebanyak 3 kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Revisi Anggaran

Uraian	30-Jun-24	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.457.628.000	2.457.628.000
Belanja Barang	32.016.637.000	62.066.786.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	34.474.265.000	64.524.414.000

Realisasi Pendapatan
Rp0,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pendapatan lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30-Jun-24		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan lain-lain	0	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Lain-lain periode yang berakhir **30 Juni 2024** ada perubahan dibandingkan **30 Juni 2023** yaitu penerimaan negara bukan pajak (pembulatan gaji).

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Pendapatan

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan lain-lain	-	6	0,00
Jumlah	-	6	0,00

Realisasi Belanja
Negara
Rp28.164.308.543,
00

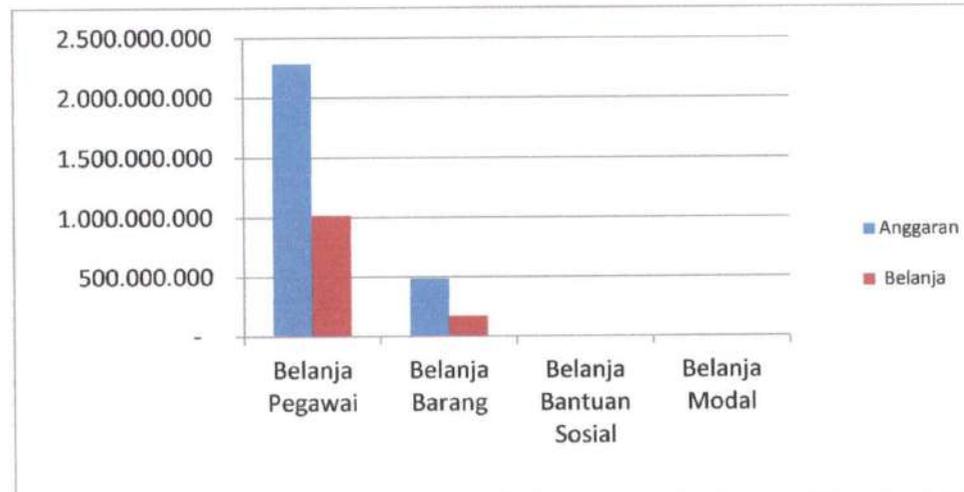
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp28.164.308.543,00 atau 44,00% dari anggaran belanja sebesar Rp64.524.414.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
30 Juni 2024

Uraian	30-Jun-24		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.457.628.000	1.445.622.230	58,82
Belanja Barang	62.066.786.000	26.718.686.313	43,05
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	64.524.414.000	28.164.308.543	43,65
Pengembalian	-	-	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan 30 Juni 2023, Realisasi Belanja 30 Juni 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi Belanja merupakan Belanja Rutin Perkantoran;

2. Karena ada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.445.622.230	1.273.009.414	13,56
Belanja Barang	26.718.686.313	10.294.052.666	159,55
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	28.164.308.543	11.567.062.080	143,49

Belanja Pegawai
Rp1.445.622.230,
00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode yang berakhir **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp1.445.622.230,00 dan Rp1.273.009.414,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** mengalami kenaikan dari **30 Juni 2023**. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pembayaran Gaji 13 untuk PNS;
2. Pembayaran Gaji 14 untuk PNS;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja ke 14 50% untuk PNS
4. Perubahan Struktural di KPU Kulon Progo;
5. Pemberian uang Kehormatan 14 bagi anggota KPU;
6. Mutasi Pegawai di Sekretariat KPU Kulon Progo

Tabel 12. Perbandingan Belanja Pegawai

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.032.041.490	874.084.616	18,07
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	413.581.116	398.925.500	3,67
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.445.622.606	1.273.010.116	13,56
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	1.445.622.606	1.273.010.116	13,56

Belanja Barang
Rp26.718,686,313,
00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp26.718.686.313,00 dan Rp10.294.052.666,00. Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 30 Juni 2023 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena ada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Tatun Anggaran 2024 dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

Tabel 13. Perbandingan Belanja Barang

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	39.629.720	69.772.968	(43,20)
Belanja Barang Non Operasional	22.631.084.640	9.128.389.090	148
Belanja Persediaan	307.152.426	0	-
Belanja Jasa	1.235.850.559	53.792.934	2.197,42
Belanja Pemeliharaan	47.516.300	59.793.100	(20,53)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.457.452.668	982.304.574	150,17
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	26.718.686.313	10.294.052.666	159,55
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	26.718.686.313	10.294.052.666	159,55

Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024** belum ada realisasi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode yang berakhir **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada **30 Juni 2024** mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan **30 Juni 2023**. Hal ini disebabkan tidak terdapat alokasi belanja modal tanah.

*Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode periode yang berakhir **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp,00, terdapat penurunan belanja modal peralatan dan mesin sebesar 0%.

*Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal **30 Juni 2024** mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi **30 Juni 2023**. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat alokasi belanja modal gedung dan bangunan pada **TA 2024**.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode yang berakhir **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal **30 Juni 2024** mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi **30 Juni 2023**. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada **TA 2024**.

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode yang berakhir **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya **30 Juni 2024** tidak mengalami

kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi **30 Juni 2023**. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal lainnya pada **TA 2022**.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada **30 Juni 2024** mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan **30 Juni 2023**. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat alokasi anggaran belanja sosial pada **TA 2024**.

*Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Jun-24	30-Jun-23
Uang Tunai	7.321.100	
Bank BRI No. 00000152-01-00192-30-9	2.287.266	
Kuitansi Belum Dipertanggungjawabkan	20.391.600	
Jumlah	29.999.966	-

Kas di bendahara terdapat angka Rp34,00 tidak ada uang pecahan kecil.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	30-Jun-24	31-Dec-23
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp30.968.182.233*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp30.968.182.233,00 dan Rp12.960.000.000,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Anggaran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	30-Jun-24	31-Dec-23
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	30.968.182.233	12.960.000.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	30.968.182.233	12.960.000.000

*Piutang PNBP
Rp0*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Uraian	30-Jun-24	31-Dec-23
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	30-Jun-24	31-Dec-23
-	-	-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar**TPA**Rp0***C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	30-Jun-24	31-Dec-23
-	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan**Piutang Tak**Tertagih –**Piutang Lancar**Rp 0***C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar
di Muka Rp0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	30-Jun-24	31-Dec-23
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	30-Jun-23	31-Dec-22
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan
Rp4.868.240

Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.868.240,00 dan Rp686.845.460,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	30-Jun-24	31-Dec-23
Barang Konsumsi	4.868.240	686.845.460
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	4.868.240	686.845.460

Persediaan rutin pada semester 1 Tahun 2024 mengalami penurunan, karena KPU Kabupaten Kulon Progo dibebankan kegiatan di Tahapan Pemilihan Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti

Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Debitur	30-Jun-24	31-Dec-23
-	-	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2024	2023
-	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2024	0

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas Tanah untuk periode 30 Juni 2024. Tanah yang digunakan sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang terletak di Jl. Wahid Hasyim Bendungan Wates, adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan status pinjam pakai.

Peralatan dan
Mesin
Rp2.567.440.136

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.567.440.136,00 dan Rp2.471.818.136,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.471.818.136
Mutasi tambah:	
Pembelian	95.622.000
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2024	2.567.440.136
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-2.151.791.979
Nilai Buku per 30 Juni 2024	415.648.157

Terdapat perubahan jumlah peralatan dan mesin pada periode yang berakhir 30 Juni 2024. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp284.648.000*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp284.648.000,00 dan Rp284.648.000,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	284.648.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	284.648.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(52.435.153)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	232.212.847

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas Gedung dan Bangunan ini untuk periode 30 Juni 2024. Gedung dan Bangunan yang digunakan sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang terletak di Jl. Wahid Hasyim Bendungan Wates, milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan status adalah pinjam pakai.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo Per 30 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas Jalan, Jaringan dan Irigasi ini untuk 30 Juni 2024. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang digunakan sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang terletak di Jl. Wahid Hasyim Bendungan Wates, adalah milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan status pinjam pakai.

Aset Tetap

Lainnya

Rp153.818.130

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp153.818.130,00 dan Rp153.818.130,00. Aset tetap tersebut berupa aset tetap dalam renovasi sebesar Rp153.818.130. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam PengerjaanRp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas Konstruksi Dalam Pengerjaan ini untuk periode 30 Juni 2024.

Akumulasi

Penyusutan Aset

TetapRp

2.320.528.812

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp2.320.528.812,00 dan Rp2.229.297.585,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah

sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.567.440.136	2.151.791.979	415.648.157
2	Gedung dan Bangunan	284.648.000	52.435.153	232.212.847
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	153.818.130	116.301.680	37.516.450
Akumulasi Penyusutan		3.005.906.266	2.320.528.812	685.377.454

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tak Berwujud ini 30 Juni 2024. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
Jumlah	0

Aset tetap tersebut berupa software komputer

*Aset Lain-Lain
Rp198.461.500*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp198.461.000 dan Rp198.461.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi

rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	198.461.500
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- BMN yang rusak ringan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2024	198.461.500
Akumulasi Penyusutan	(197.261.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.200.000

Tidak terdapat mutasi kurang atas Konstruksi Dalam Pengerjaan ini untuk periode 30 Juni 2024.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp197.261.500,0
0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebagai berikut : Rp197.261.500,00 dan Rp197.261.500,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain			0
Jumlah	0	0	0

*Uang Muka dari
KPPN
Rp30.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang

muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Terdiri Uang Persediaan sebesar Rp30.000.000,00.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp193,713,218,0
0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp193,713,218,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Periode 30 Juni 2024 terdapat hutang pada pihak ketiga yaitu merupakan beban belanja gaji dan tunjangan bulan Juli yang di ajukan di bulan Juni. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada KPU Kabupaten Kulon Progo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-	Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara
Potongan pajak yang belum disetor	-	Potongan pajak belanja UP belum disetor ke kas negara
Utang kepada Pihak ketiga	193.713.218	Merupakan beban belanja gaji dan tunjangan bulan juli yang diajukan di bulan juni
Total	193.713.218	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp14.963.900,00

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Pendapatan Diterima di Muka untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.963.900,00 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	Jumlah
Utang Yang Belum Ditagihkan	14.963.900
Total	14.963.900

Hibah yang harus
disahkan Rp.0,00

C.27 Beban yang masih dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima

diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Hibah yang belum disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

*Rp12.029.027.371,
00*

C. 28 Ekuitas

Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar sebagai berikut Rp12.029.027.371,00 dan Rp14.329.032.141,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL*Pendapatan**PNBP**Rp0***D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 45. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Jasa tidak ada baik Semester I tahun 2024 dan tahun 2023. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain tidak ada baik Semester I tahun 2024 dan tahun 2023.

*Beban Pegawai**Rp1.639,335,448,00***D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp1.639.335.448,00 dan Rp1.451.761.179,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 46. Rincian Beban Pegawai

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	462.457.938	402.867.700	14,79%
Beban Tunjangan-Tunjangan	1.176.877.510	1.048.893.479	12,20%
Jumlah	1.639.335.448	1.451.761.179	12,92%

*Beban**Persediaan**Rp2.135.010.948,00***D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan KPU Kab. Kulon Progo untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp2.135.010.948,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir **30 Juni**

2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Beban Persediaan
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	2.135.010.948	-	-
Jumlah Beban Persediaan	2.135.010.948	-	-

Ada peningkatan di Tahun 2024 karena di KPU Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon rogo Tahun 2024.

Beban Barang
dan Jasa

Rp24.803.859.504,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.803.859.504,00 dan Rp9.258.296.592,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Beban Barang dan Jasa
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	11.183.220	14.888.268	-24,89
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.000	0	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	28.768.000	56.900.000	-49,44
Beban Barang Operasional Penangan Covid	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan	3.714.326.525	1.106.548.200	0,00
Pengembalian Bebab Bahan	-10.000	0	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	14.582.874.000	7.155.200.000	0,00
Pengembalian Beban Honor Ouput Kegiatan	-1.050.000		0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.013.186.200	870.967.190	0,00
Beban Langganan Listrik	34.416.548	21.798.426	57,89
Beban Langganan Telepon	7.864.811	8.027.008	-2,02
Beban Langganan Air	1.830.200	1.217.500	50,32
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Beban Sewa	199.925.250	0	0,00
Beban Jasa Profesi	0	1.500.000	0,00
Beban Jasa Lainnya	1.210.513.750	21.250.000	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah	24.803.859.504	9.258.296.592	267,91

Kenaikan yang signifikan terjadi ditahun 2024 karena ada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 .

Beban**Pemeliharaan**

Rp56.226.300,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp56.226.300,00 dan Rp59.793.100,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebagai berikut:

*Tabel 49. Rincian Beban Pemeliharaan
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	603.500	26.013.500	-97,68%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.622.800	33.779.600	64,66
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Jumlah	56.226.300	59.793.100	63,69

Beban Perjalanan**Dinas**

Rp2.908.291.188,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebagai berikut Rp2.908.291.188,00 dan Rp996.354.574,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian *Beban Perjalanan Dinas* untuk **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebagai berikut:

*Tabel 50. Rincian Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	86.011.138	37.650.179	1,28
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.158.135.000	380.600.000	0%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-150.000		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.560.488.500	431.296.500	0%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meting Luar Kota	-1.164.600		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	104.971.150	146.807.895	0%
Jumlah	2.908.291.188	996.354.574	320,40

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebagai berikut:

*Tabel 51. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebagai berikut:

*Tabel 52. Rincian Beban Bantuan Sosial
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir **30**

Rp91.231.227,00

Juni 2024 dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp91.231.227,00 dan Rp71.410124,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87.485.859	67.664.756	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.745.368	3.745.368	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	91.231.227	71.410.124	-

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Defisit dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp95.622.000,00

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Defisit dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebagai

berikut:

Tabel 55. Rincian Kegiatan Non Operasional
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	95.622.000	0	-
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	95.622.000	0	-

*Defisit Pos Luar
Biasa Rp0*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebagai berikut:

*Tabel 56. Rincian Pos Luar Biasa
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	30-Jun-24	30-Jun-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPN	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**Ekuitas Awal**Rp14.329.032.141,
00**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp14.329.032.141,00 dan Rp613.431.848,00.

Surplus (Defisit)

LO

Rp(31.538.332.615,0
0)**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebesar Rp(31.538.332.615,00) dan Rp(11.837.615.563,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/deficit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan penyesuaian atas nilai aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun **30 Juni 2024** adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Nilai Aset

TetapRp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang asset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 58. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
30 Juni 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset Tetap Lainnya	-
Aset Lainnya	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Tabel 59. Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp29.238.327.845,
00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir **30 Juni 2024** dan **30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp29.238.327.845,00 dan Rp11.567.062.074,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Tabel 60 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	29.238.327.845
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	29.238.327.845

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga **30 Juni 2024**, DDEL sebesar Rp(0) sedangkan DKEL sebesar Rp29.238.327.845,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal **30 Juni 2024** sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel 61. Rincian Transfer Masuk

No	Jenis	Entitas Pengirim	Nilai
1			
2			
3			
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal **30 Juni 2024** sebesar Rp0:

Tabel 62. Rincian Transfer Keluar

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1			
2			
3			
	Jumlah		-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal **30 Juni 2024** sebesar Rp19.421.341.000,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal **30 Juni 2024** adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk **30 Juni 2024** adalah sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Pengesahan Hibah

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Hibah Uang	Rp 19.421.341.000
2		0	Rp -
3	0	0	Rp -
4	0	0	Rp -
Total Pengesahan			Rp 19.421.341.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 19.421.341.000

Ekuitas Akhir

Rp12.029.027.371,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada **30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023** adalah masing-masing sebesar Rp12.029.027.371,00 dan Rp342.87.359,00.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak Ada Kejadian Khusus

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang dikelola oleh KPU Kabupaten Kulon Progo adalah :

Bank	No. Rekening	Nama Rekening
BRI Cabang Wates	651896576051000	BPG 176 KPU Kabupaten Kulon Progo

2. Berdasarkan SK Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran (076) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 2 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Widi Purnama, S.IP, M.Si
Pejabat Pembuat komitmen : Marsudi Adji, S.Sos
Pejabat Penanda tangan SPM : Ina Noviyatun Nugraheni, S.IP
Bendahara Pengeluaran : Trias Tuti Hidayanti, SIP, MA

3. Pada Semester I Tahun 2024 KPU Kab. Kulon Progo melakukan Revisi DIPA sebanyak 4 kali terdiri, 3 kali Revisi Penyesuaian hal tiga triwulanan dan 8 kali Revisi POK dari KPA.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan / Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan /Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Peny.sampai periode ini	Beban Peny.	Total Akm.	Nilai Buku
					Tahun 2023	Peny.sampai periode ini	Per 30-06-2023
A	Tanah						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	841.201.500	767.412.215	24.596.428	792.008.643	49.192.857
2	Alat Kantor	52	147.880.000	136.267.500	2.212.500	138.480.000	9.400.000
3	Alat Rumah Tangga	94	518.689.336	369.241.599	16.917.937	386.159.536	132.529.800
4	Alat Studio	11	58.895.000	22.699.000	4.044.000	26.743.000	32.152.000
5	Alat Komunikasi	2	5.037.000	5.037.000	-	5.037.000	-
6	Unit Alat Laboratorium	0	-	-	-	-	-
7	Peralatan Olah Raga	1	4.500.000	-	750.000	750.000	3.750.000
8	Peralatan Pemancar	1	119.300.000	83.510.000	5.965.000	89.475.000	29.825.000
9	Komputer Unit	39	565.094.100	427.030.350	24.616.250	451.646.600	113.447.500
10	Peralatan Komputer	61	306.843.200	253.108.456	8.383.744	261.492.200	45.351.000
	Jumlah		2.567.440.136	2.064.306.120	87.485.859	2.151.791.979	415.648.157
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	284.648.000	48.689.785	3.745.368	52.435.153	232.212.847
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		284.648.000	48.689.785	3.745.368	52.435.153	232.212.847
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	-	-	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	37.516.450	-	-	-	37.516.450
	Jumlah		37.516.450				37.516.450
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Gedung dan Bangunan dalam Renovas	2	116.301.680	116.301.680	-	116.301.680	-
	Jumlah		116.301.680	116.301.680	-	116.301.680	-
G	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud*		-	-	-	-	-
2	Aset yang dihentikan penggunaannya	71	198.461.500	197.261.500	-	197.261.500	1.200.000
	Jumlah		198.461.500	197.261.500	-	197.261.500	1.200.000
	Total		3.204.367.766	2.426.559.085	91.231.227	2.517.790.312	686.577.454

* Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang / Barang /Jasa

KPU KABUPATEN KULON PROGO
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 30 Juni 2024

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
	Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo	Uang	Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo	Rp 19.421.341.000,00	Rp 19.421.341.000,00		
			Jumlah	Rp 19.421.341.000,00	Rp 19.421.341.000,00	Rp -	